

Aset Pemerintah Sering Terbengkalai

Abdul Khoir
Borneo Tribune, Pontianak

Setelah satu bulan lalu melakukan pemeriksaan dengan objek tertentu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kamis (3/11) menyebutkan sederet temuan dan salah satunya terkait aset

tanah yang bermasalah.

Diantaranya terdapat enam lahan yang merupakan aset Pemprov Kalbar seluas 155.124 meter persegi yang terletak di Pontianak, Singkawang dan Bengkayang yang statusnya dikuasai pihak ke tiga, dan demikian juga dengan 893 bidang tanah yang tercatat pada neraca

per 31 Desember 2010 hanya 290 bidang yang telah bersertifikat, dan dari 290 tersebut sebanyak 144 bidang tanah dengan luas 2.803 meter persegi bersertifikat tidak atas nama Pemprov Kalbar. Dikatakan Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan

....Ke Halaman -11

Aset Pemerintah Sering Terbengkalai

Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), Kainda, Jumat (4/11) permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Pemrov Kalbar juga banyak terjadi di hampir seluruh instansi pemerintah dimana aset sering terbengkalai tidak terurus sehingga sering beralih tangan tanpa sepengetahuan.

"Lahan banyak yang tidak diberdayakan atau hanya dibiarkan terlantar," kata Kainda.

Pemprov yang memiliki aset di seluruh wilayah Kalbar, memang akan menemui kesulitan jika ditanya mengenai dokumen dan asal usul aset yang dimiliki terutama tanah, sehingga per-

lu adanya manajemen khusus terutama dalam pengawasan dan pemanfaatan lahan yang sudah menjadi aset pemerintah.

"Selayaknya jika tanah tersebut sudah menjadi aset setidaknya dibangun tanda-tanda khusus baik berupa patok atau plang papan nama kepemilikan, sehingga tidak menimbulkan niat dari pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dengan cara ilegal," katanya.

Terkait masih banyaknya aset yang belum disertifikasi atas nama pemrov Kalbar, BPN akan selalu membuka diri dan bahkan

akan memfasilitasi untuk pengurusannya, sehingga aset-aset tersebut tidak bermasalah lagi.

Dengan tetap berpedoman adanya Alas Hak atau bukti-bukti perolehan atas lahan yang menjadi aset tersebut, dan juga adanya permohonan maka BPN akan membantu dalam pensertifikatan.

Dan demikian juga dengan lahan yang sudah menjadi aset namun tidak diketemukan lagi dokumen terkait alas hak atau juga dokumen lain sehingga tidak dapat diproses pembuatan sertifikatnya secara normal, maka BPN juga masih memberikan jalan keluar yakni Pem-

prov Kalbar melampirkan surat keterangan dari kepolisian, adanya surat pernyataan bahwa lahan tersebut sudah masuk dalam daftar aset pemerintah dan juga lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa.

"Semua bisa disertifikasikan, asal jelas dan masing-masing ada tata caranya," imbuhnya.

Dengan berdasarkan temuan BPK tersebut, Kainda berharap Pemprov Kalbar agar dapat langsung memberikan tanda-tanda akan semua aset tanah milik pemerintah tersebut, dan demikian juga untuk advis BPN akan selalu memberikan fasilitas untuk itu. □